

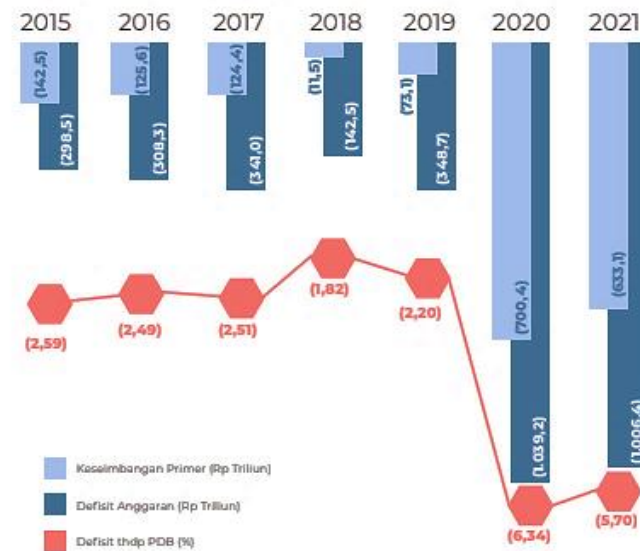
## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia menjadi salah satu negara yang dihadapkan dengan penyebaran Virus Covid-19 sehingga memberikan dampak yang cukup besar bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirancang pada tahun 2019 tentu tidak memperhitungkan keadaan darurat kesehatan yang merupakan dampak dari penyebaran virus tersebut, sehingga pemerintah melakukan perubahan terhadap APBN pada April 2020, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian dengan target penurunan pendapatan dan peningkatan pada anggaran belanja negara.

Pada Juli 2020, Pemerintah kembali melakukan perubahan kedua atas APBN 2020, melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dengan kembali diturunkannya target pendapatan Negara dan peningkatan pada anggaran belanja Negara. Pemerintah telah memperkirakan pandemi yang mempengaruhi perekonomian negara dan dapat diatasi dalam waktu tiga tahun anggaran, sehingga kewenangan ini berlaku paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Hal ini tentu dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Negara di masa yang akan mendatang.



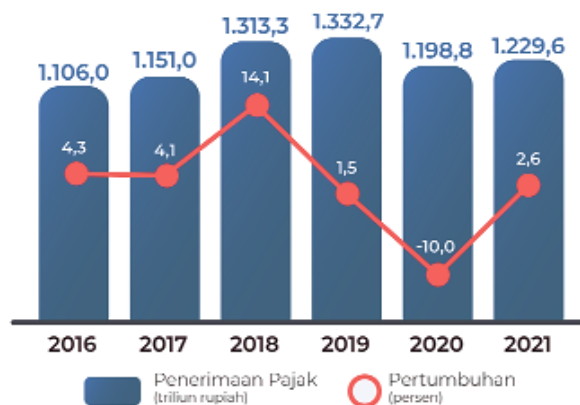
Gambar 1.1.1 : Ringkasan APBN 2021 (Sumber : Kementerian Keuangan)

Pulihnya perekonomian negara mulai terlihat pada tahun 2021 dimana defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun hingga 5,70% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penerimaan pendapatan Negara yang mengalami peningkatan berbagai aspek. Dalam rangka untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi Negara di tengah ketidakpastian Covid-19, pemerintah terus mengupayakan strategi pemulihan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang lebih luas dan tertata agar defisit APBN tidak melebihi 3% dari PDB sesuai penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Keuangan Negara.

Penerimaan pajak sebagai pendapatan negara yang paling tinggi terus mengoptimalkan penerimaan melalui perluasan basis pajak serta pelaksanaan pada reformasi yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dari meningkatnya penerimaan perpajakan hingga 2,6% yang didukung oleh kinerja positif penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM). Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa pajak memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi serta transformasi ekonomi negara.

### Penerimaan Pajak, 2016-2021



Gambar 1.1.2 : Tren Penerimaan Pajak (Sumber : Kementerian Keuangan)

Penerimaan pajak yang terkontraksi pada tahun 2020 akibat penurunan aktivitas ekonomi dan pemberian insentif fiskal pandemi Covid 2019 telah mengalami pertumbuhan di tahun 2021 karena pulihnya harga komoditas serta perbaikan administrasi pajak dan implementasi pajak atas perdagangan.

Dalam penerimaan perpajakan, Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak subjektif yang langsung dipungut oleh pemerintah pusat dan telah menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang telah diterima dalam satu tahun pajak, salah satu Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia dan digunakan dalam suatu badan usaha adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagai iuran kepada negara atas penghasilan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh

setiap karyawannya. Pemungutan Pajak Penghasilan pasal 21 dilakukan pada saat pencatatan penggajian yaitu dengan cara melakukan pemotongan secara langsung.

Pada setiap perusahaan maupun badan usaha, sistem pencatatan penggajian dan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dilakukan secara berbeda-beda mulai dari prosedur, perhitungan, komponen, hingga media yang digunakan. Adapun pencatatan secara manual yang masih dipergunakan alat hitung yang sederhana sehingga proses pencatatan penggajian dan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 kurang efektif dan efisien. Akurasi perhitungan pada gaji dan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 ini sangat penting karena menyangkut kepentingan antara pihak karyawan dan perusahaan. Penyelesaian perhitungan yang tidak akurat akan menimbulkan ketidaktepatan waktu yang akan mempengaruhi kehidupan karyawan, serta menimbulkan keterlambatan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 yang memiliki konsekuensi bagi perusahaan yang akan mempengaruhi pajak sebagai pendapatan negara. Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan suatu perusahaan maupun badan usaha dalam pemulihan ekonomi, serta memudahkan manajemen dalam pengelolaan sumber daya manusia, perpajakan yang berbasis teknologi sistem informasi dapat mengatasi kelemahan sistem manual yang dinilai kurang efektif dan efisien.

Koperasi Kredit Mitra Usaha Sejahtera merupakan salah satu koperasi kredit di Indonesia yang bergerak di bidang simpan pinjam. Koperasi yang berdiri pada tanggal 5 Mei 1995 ini memiliki beberapa kantor cabang pembantu yang tersebar di Kota Bandung dan kantor pusat yang berlokasi di Jalan Pahlawan No. 47, Bandung. Proses pencatatan gaji dan perhitungan Penghasilan pasal 21 di

Koperasi Kredit Rahastra masih dilakukan secara manual menggunakan media pengolahan data *Microsoft Excel*. Dengan karyawan yang cukup banyak di setiap cabangnya dan sistem yang masih kurang memadai ini banyak terdapat kendala saat dilakukannya transaksi penggajian karyawan. Maka untuk menghindari kekeliruan dalam pengolahan data diperlukan sistem informasi penggajian dan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang otomatis dan terkomputerisasi.

Dengan adanya modernisasi sistem penggajian dan perpajakan yang semakin maju, menjadi salah satu bentuk upaya dalam pemulihan perekonomian Negara dalam meningkatkan pendapatan Negara serta Sumber Daya Manusia. Dengan demikian, penulis mengambil judul **“Perancangan Sisten Informasi Akuntansi Penggajian dan Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada Koperasi Kredit Rahastra menggunakan *Microsoft Access*”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan beberapa uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Indonesia menjadi salah satu Negara yang terdampak penyebaran Covid-19 sehingga menyebabkan kemerosotan perekonomian Negara.
2. Pelaksanaan APBN 2020 tidak sesuai dengan perancangan yang seharusnya karena tidak memperhitungkan keadaan darurat sehingga mengalami perubahan postur dan rincian APBN.
3. Anggaran belanja Negara masih terus mengalami peningkatan karena penanganan kesehatan akibat Covid-19.

4. Banyaknya badan usaha yang belum melakukan upaya perpajakan berbasis teknologi sistem informasi yang akurat yang dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran pajak dan mempengaruhi proses pemulihan perekonomian Negara.
5. Koperasi Kredit Rahastra menjadi salah satu badan usaha yang masih menerapkan sistem manual dalam pencatatan penggajian dan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 sehingga prosesnya kurang efektif dan efisien.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah, yaitu bagaimana perancangan sistem informasi akuntansi penggajian dan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 menggunakan *Microsoft Access* yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi Kredit Rahastra.

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk melakukan pengembangan sistem informasi akuntansi dalam pencatatan penggajian dan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 sehingga dapat memudahkan manajemen keuangan dalam pengelolaan sumber daya manusia terutama pada Koperasi Kredit Rahastra.

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dapat dicapai dari penelitian ini adalah sebagai bentuk penerapan sistem informasi akuntansi terhadap pencatatan penggajian

dan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 menggunakan *Microsoft Access* 2013 sesuai dengan kebutuhan pada Koperasi Kredit Rahastra.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian baik kegunaan penelitian secara teoritis maupun praktik yang akan dijelaskan sebagai berikut :

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu ilmu terapan yang didapatkan secara teori maupun praktik dengan tujuan untuk memajukan sistem informasi akuntansi pada pencatatan penggajian dan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 yang diterapkan suatu perusahaan dengan terkomputerisasi.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Dari hasil penelitian serta perancangan sistem informasi akuntansi penggajian dan Pajak Penghasilan pasal 21 ini, diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi usulan bahan pertimbangan dalam upaya membantu perbaikan masalah terkait sistem informasi pencatatan penggajian dan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada Koperasi Kredit Rahastra.

## **1.6 Landasan Teori**

### **1. Perancangan**

Menurut Berto Nadeak, Dkk (2016 : 54), Perancangan adalah Langkah pertama dalam suatu fase pengembangan rekayasa produk atau sistem. Perancangan adalah proses penerapan dari berbagai teknik dan juga prinsip yang memiliki tujuan untuk mendefinisikan sebuah peralatan, satu proses,

atau suatu sistem secara detail yang membolehkan dilakukannya realisasi fisik.

## 2. Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan suatu bagian-bagian yang saling berhubungan yang membentuk rangkaian informasi sehingga saling ketergantungan satu sama lain.

Menurut Anggun Nugroho (2015 : 974), Sistem Informasi adalah kumpulan elemen-elemen atau sub sistem yang disatukan yang saling berkaitan dan berhubungan untuk mengelola data sehingga menjadi berarti bagi penerima dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan di saat ini atau di masa yang akan datang.

### 1.7 Metodologi Penelitian

#### 1.7.1 Jenis Penelitian Dan Metode Yang Digunakan

*Research and Development (R&D)* merupakan metode penelitian secara sengaja, sistematis, untuk menemukan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, maupun menguji keefektifan produk, model, maupun metode, strategi, atau cara yang lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif, dan bermakna. (Nusa Putra, 2015)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *R&D (Research and Development)* dimana penelitian ini digunakan untuk mengembangkan dan menghasilkan produk baru yaitu Sistem Informasi Akuntansi Penggajian dan Pajak Penghasilan pasal 21 sesuai dengan kebutuhan pada Koperasi Kredit Rahastra.



### **1.7.2 Jenis Dan Sumber Data Penelitian**

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Pengambilan data primer pada penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui observasi langsung di Koperasi Kredit Rahastra.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari penelitian secara tidak langsung ini melalui proses Analisa terhadap data-data penunjang pada Koperasi Kredit Rahastra.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan, yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengamati serta mencatat berbagai proses secara langsung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi yang digunakan untuk meneliti secara langsung pengolahan data pengajian serta perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada Koperasi Kredit Rahastra.

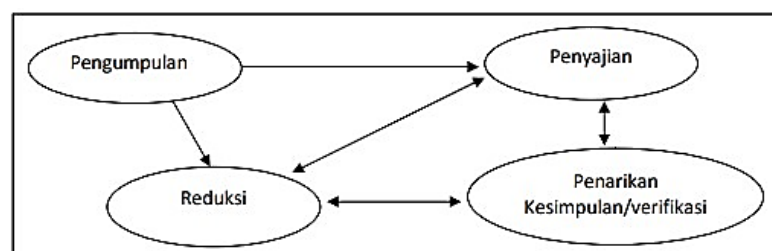
2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan menganalisis data-data dari catatan, administrasi di suatu perusahaan sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, dokumen diperoleh dari data penunjang berupa data karyawan, komponen-komponen data pada slip gaji karyawan Koperasi Kredit Rahastra.

#### 1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2018:428)

Data yang telah diperoleh dari penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dapat digambarkan dalam model interaktif sebagai berikut :



Gambar 1.7.1 : Model Interaktif analisis data Miles dan Huberman

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data tersebut jenuh. Ukuran kejenuhan ini ditandai dengan tidak diperoleh lagi data atau informasi

baru. Aktivitas dalam analisis ini meliputi Reduksi data (*reduction*), penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (*conclusion drawing/verification*). (Miles, dan Hubberman, 1992:90)

Penelitian ini difokuskan dalam kegiatan pengendalian internal atas sistem dan proses pengolahan penggajian dan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 pada Koperasi Kredit Rahastra.

### **1.8 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara langsung di kantor pusat Koperasi Kredit Rahastra yang berlokasi di Jalan Pahlawan Kota Bandung No. 59. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) bulan dengan proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan.